

**LATAR BELAKANG SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT ISLAM
(Studi Kasus Tukang Perahu di Desa Brodot
Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten
Jombang Propinsi Jawa Timur)**

Syamsul Huda

(Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Kediri Jawa Timur)

syamsul_huda63@yahoo.co.id

Absrtack

This study discusses the socio-economic background of the Islamic community who work as boatmen and farmers in the Brodot Village Bandarkedungmulyo District Jombang of East Java Province. This study is a qualitative study, which seeks to explore aspects of the economic and social aspects Brodot villagers who worked as a boatman and farmers. Data collection in this study was done in two ways: observation and interviews. The results of this study indicate that the profession as a farmer who cultivated by villagers Brodot Bandarkedungmulyo Jombang District of East Java Province, with an income about 300,000 rupiah per month is not sufficient for their daily needs. Therefore, to anticipate the needs of everyday life, they look for other income that is as boatman with an average income of 250,000 rupiah per month. With the extra they can cover their daily life with family even lived a simple life and mediocre.

Keyword: *socio-economic, Islamic community, Brodot Village*

KONTEKS PENELITIAN

Desa Brodot, adalah desa yang berada paling barat di Kabupaten Jombang, dan keberadaannya di tepi sungai Brantas yang lebar, yang melintas dari ujung selatan sampai ujung utara, atau lebih terkenal sungai yang melintas dari Kota Malang, Blitar,

Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. Untuk melakukan komunikasi dengan desa yang berada di seberang sungai dan sekitarnya (wilayah Kabupaten Nganjuk), tentu tidak bisa dicapai dengan transportasi biasa, (kendaraan darat, atau jalan kaki), tetapi perlu dengan sarana jembatan atau perahu penyeberangan. Mengadakan jembatan dengan cara swadaya masyarakat kemungkinan sangat kecil sekali, kalau tidak mau dikatakan mustahil, sebab sungainya sangat lebar sekali ± 1000 m. Maka hal yang terakhir (perahu penyeberangan) itulah yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat di Desa Brodot dan sekitarnya.

Lahan yang sempit dan tidak produktif, upah buruh tani yang rendah, bagi hasil yang tidak menguntungkan dan sebagainya, merupakan unsur motivasi yang lebih besar bagi petani untuk mencari nafkah dari sektor lain (non pertanian) sebagai tambahan biaya hidup. Keadaan ini disebut mobilitas. Adapun yang dimaksud mobilitas di sini adalah mobilitas geografis dan mobilitas kerja.¹

Sektor non pertanian yang dimasuki oleh petani sebagai pekerjaan alternatif atau mobilitas kerja salah satunya adalah menjalankan kegiatan menyeberangkan orang, atau barang dari Desa Brodot dan sekitarnya ke seberang barat atau memasuki wilayah Kabupaten Nganjuk dan sebaliknya dengan menggunakan perahu sebagai perangkat utamanya, sehingga terjadi mobilitas masyarakat dan barang yang ada di sekitar sungai Brantas. Pekerjaan itulah yang mereka anggap dapat menambah biaya hidup yang mereka perlukan.

Sehubungan dengan masalah di atas, beberapa hal yang hendak dibahas dalam tulisan ini antara lain: Faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi mereka memilih menjadi tukang perahu. Gambaran umum tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Islam Desa Brodot. Serta seberapa banyak pendapatan mereka dari menjadi tukang perahu dalam menopang kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini bermaksud untuk melengkapi salah satu tugas edukatif, meningkatkan kreatifitas dalam upaya melaksanakan tugas dan kewajiban civitas akademika. Juga ingin mengetahui faktor sosial ekonomi yang melatar belakangi mereka

¹ Ida Bagus Mantra, *Studi Mobilitas Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fak. Geografi UGM, 1976), 2.

memilih menjadi tukang perahu, gambaran umum tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Islam desa Brodot, mengetahui seberapa banyak pendapatan mereka dari menjadi tukang perahu dalam menopang kebutuhan hidupnya. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi positif kepada pihak-pihak yang memegang kekuasaan dan otoritas, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pengembangan kebijakan berikutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi yang bersifat kualitatif, yakni sebuah studi yang berusaha untuk menggali kedalaman gejala yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh, berusaha memahami fenomena atau obyek yang dapat dipersrsepi, obyek yang dapat difahami.² Adapun data yang terkumpul dari penelitian ini mengandung dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Brodot yang bekerja sebagai tukang perahu satu sisi, dan di sisi yang lain sebagai petani, atau nyambi, serta semata-mata sebagai tukang perahu.

Oleh karena studi ini bersifat kualitatif, maka jumlah peserta responden ditentukan, yaitu 3 orang dari 5 orang yang bekerja sebagai tukang perahu, di mana masing-masing mempunyai perbedaan dalam kaitannya dengan struktur penguasaan tanah, serta perbedaan dalam tempat tinggalnya dan lokasi tempat pangkalan perahu sebagai penyeberangannya.

Berdasarkan pemilikan atau penguasaan tanahnya, ketiga responden tersebut adalah: 1). Petani gurem yang berstatus sebagai pemilik dan penggarap tanahnya sendiri. 2). Petani tidak bertanah, tetapi berstatus sebagai petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil. 3). Petani tidak bertanah, yang berstatus sebagai buruh tani.

Di desa ini terdapat 3 pedukuhan dan 3 responden, masing-masing bertempat tinggal di Pedukuhan Klaci bernama Pak Sutoyo,

²Khozin Affandi, *Hermeneutika dan fenomenologi: Dari teori ke Praktek* (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2007), 6. Juga dalam Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 14. Juga dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 219.

Pedukuhan Brodot bernama Pak Jausin, dan Pedukuhan Delik bernama Pak Basoni. Dengan penentuan semacam ini, ketiga responden ini tidak dimaksudkan sebagai orang-orang yang mewakili seluruh populasi yang ada.

Dalam hal pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Observasi yang dimaksud di sini adalah bahwa penulis mengamati secara langsung dan mendalam serta mencatatnya secara langsung terhadap subyek maupun obyek yang diteliti. Sedangkan wawancara digunakan dengan dua metode, yaitu wawancara bebas (*free interview*) dan wawancara mendalam (*dept interview*). Dengan ini dimaksudkan agar pembicaraan antara penulis dengan subyek yang diteliti menjadi lebih luwes. Kemudian, agar pembicaraan lebih terarah, maka untuk ini dibuat suatu pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu catatan yang mengandung daftar dari pokok masalah yang hendak ditanyakan kepada responden.³

PEMBAHASAN

Keadaan Geografis Daerah Penelitian

Salah satu faktor yang turut mendukung berkembangnya suatu masyarakat atau suatu komunitas adalah keadaan geografis, yakni di mana masyarakat atau komunitas itu berada. Brodot, adalah nama dari sebuah desa atau kelurahan yang terletak di dalam wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Propinsi Jawa Timur, yang berada di tepi sungai Brantas kurang lebih 7 km dari kecamatan dan kurang lebih 20 km dari ibukota Kabupaten Jombang. Adapun batas-batas daerah yang melingkupi wilayah Desa Brodot adalah sebagai berikut: a) Sebelah utara dibatasi oleh Desa Brangkal b) Sebelah timur dibatasi oleh Desa Pucangsimo c) Sebelah selatan dibatasi oleh Desa Bandarkedungmulyo d) Sebelah barat dibatasi oleh Sungai Brantas.

Desa Brodot, sebagaimana desa-desa yang lain yang bercorak agraris, di mana sebagian besar penduduknya hidup dari

³ Koentjoroningrat, *Metode Wawancara dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), 181.

hasil-hasil pertanian. Adapun tanah pertanian di desa ini menempati areal dalam perincian sebagai berikut:

TABEL I
ALOKASI TANAH DESA BRODOT

No.	Status Tanah	Sawah	Tegal	Pekarangan
1	Yasan ¹	279,8830 Ha		
2	Bengkok ¹	40,5105 Ha		
3	Gogolan ¹	1,8185 Ha		
4	Kas Desa	30,9700 Ha	1,7650 Ha	152,0240 Ha
5	Pekarangan		10,8100 Ha	
6	Jalan	16,2300 Ha		
7	Lapangan			
8	Sekolahan	3,0795 Ha		
9	Wakaf	0,2205 Ha		
10	Kuruban	2,8130 Ha		
	Jumlah	375,5250 Ha	12,5750 Ha	152,0240 Ha

Sumber : Sriyatun Utami Kasun Desa Brodot

Dari tabel di atas, tanah di sini menempati areal seluas 540,124 Ha Desa Brodot terbagi menjadi 3 pedukuhan:

1. Pedukuhan Delik
2. Pedukuhan Brodot
3. Pedukuhan Klaci.

Dilihat secara umum, kondisi geografis di desa ini cukup menguntungkan bagi usaha pertanian, mengingat keadaan tanah pada umumnya datar berpasir dan bersifat tanah ringan.⁴

Keadaan Demografis

Penduduk Desa Brodot, menurut perhitungan tahun 2014 berjumlah 10.320 jiwa, dengan perincian, jumlah penduduk laki-laki sebesar 4.960 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 5,360 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk tersebut menyebar pada 1966 Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 1392 laki-laki dan 574 KK perempuan.

⁴Observasi, Brodot, 24 Agustus 2014.

Sedangkan kepadatan penduduk Desa Brodot menurut perhitungan tahun 2014, yaitu dengan membagi jumlah penduduk yang mendiami wilayah desa itu dengan luas daerah keseluruhan, diperoleh angka sebesar 18224,98 jiwa/km². Mengacu pada ukuran demografis, dengan kepadatan sebesar itu, maka penduduk di Desa Brodot ini boleh dikatakan cukup padat.

Kemudian komposisi penduduk adalah sebagai berikut :

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK DESA BRODOT MENURUT UMUR
DAN JENIS KELAMIN PADA TAHUN 2001

No.	Umur/ Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	1- 5	1014	988	2.002	19%
2	6- 12	743	825	1.568	15%
3	13-19	820	796	1.616	16%
4	20 - 30	806	925	1.731	17%
5	31 -50	959	987	1.946	19%
6	50 ke atas	618	839	1.457	14%
	Jumlah	4.960	5.630	10.320	100%

Sumber : Sriyatun Utami Kasun Desa Brodot⁵

Keadaan Mata Pencaharian

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Demikian juga halnya dengan penduduk Desa Brodot, ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV
PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BRODOT

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Petani	883	468	1.351	33%
2	Buruh Tani	802	357	1.159	28%
3	Buruh	600	461	1.083	26%
4	Pegawai negeri	168	61	229	6%
5	ABRI	62	1	61	2%
6	Pedagang	116	105	221	5%

⁵ Hal ini dilakukan mengingat kantor Desa sedang di renofasi, kalau pun ada data yang terpampang di Kantor Desa sudah tidak cocok, dan merupakan peninggalan pejabat yang terdahulu, dan belum diperbaruhi.

	Jumlah	2.631	1.453	4.084	100
--	--------	-------	-------	-------	-----

Sumber : Sriyatun Utami Kasun Desa Brodot

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di desa Brodot ini mempunyai mata pencaharian dengan mengandalkan sektor pertanian, yaitu: berjumlah 2,510 orang atau 61% dari jumlah seluruh penduduk usia yang berjumlah 4.084 orang (penduduk usia kerja 10-60 tahun). Mereka itu terdiri dari petani pemilik, buruh tani, termasuk petani penggarap, berjumlah 1.159 orang (28%). Dari data tersebut diketahui ternyata ada sebagian besar di desa ini ada petani yang tidak memiliki tanah.

Jika kelompok tani yang di maksud di sini adalah orang-orang yang memiliki tanah, maka prosentase yang menunjuk jumlah petani pada tabel tersebut, seharusnya tidak mutlak menunjuk pada orang-orang yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani semata-mata, karena sementara, di pihak lain, ada orang yang berpencaharian pokok sebagai petani, (PNS, TNI, pedagang) juga memiliki sawah. Dengan demikian orang-orang yang dikategorikan sebagai pemilik tanah tentu lebih besar dari 33%.

Selanjutnya, dari petani pemilik yang berjumlah 1.351 orang itu jika dikaitkan dengan luas persawahan yang ada, yakni sebesar 279,8830 Ha (tanah sanggar), maka rata-rata luas tanah hanya 0.2000 Ha Akan tetapi tanah-tanah milik yang tersedia untuk pertanian di sini memperlihatkan distribusi luas yang sangat bervariasi. Golongan petani tertentu dan sedikit jumlahnya di desa ini, bisa memiliki tanah sawah lebih dari 1 Ha. Sedangkan di pihak lain, golongan petani miskin yang besar jumlahnya rata-rata tanah yang dimiliki hanya seluas kurang dari 0,5 Ha (gurem). Adanya polarisasi pemilikan tanah semacam ini mengakibatkan banyak petani gurem di sini terpaksa harus mencari tambahan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup, misalnya menambah luas garapan dengan jalan menyewa atau menggarap tanah dengan jalan menyewa atau menggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil.⁶

Kelompok buruh tani yang mencapai jumlah cukup banyak, nomor dua sesudah jumlah kelompok petani pemilik, tentu saja

⁶*Observasi*, Brodot, 31 Agustus 2014

dikategorikan sebagai orang-orang yang benar-benar tidak memiliki tanah garapan. Sebagian dari buruh-buruh tani yang ada, selain hanya sebagai buruh pada petani pemilik (biasanya pada petani pemilik dengan luas tanah garapan di atas 0,5 Ha) semata-mata, pada saat-saat tertentu juga menggarap tanah orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Cara ini, selama ini hampir merupakan indikasi yang kuat atas persoalan-persoalan ekonomi yang menimpa para petani yang tidak memiliki tanah di pedesaan, terutama di Jawa.

Sedangkan kelompok buruh yang mencapai prosentase sebesar 2.6%, sedikit di bawah kelompok buruh tani, juga merupakan indikasi dari orang-orang yang sama sekali tidak memiliki tanah garapan. Mereka ini bekerja di sektor-sektor non pertanian dan kebanyakan sebagai buruh serabutan, yaitu memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan setiap saat pada bidang pekerjaan yang memerlukan tenaga buruh, misalnya sebagai buruh bangunan, bakul, buruh industri kecil, tukang perahu, dan berbagai macam pekerjaan yang padat tenaga kerja serta sedikit memerlukan modal.

Satu hal yang perlu diketahui adalah bahwa struktur pekerjaan yang ada pada angkatan kerja di pedesaan, khususnya yang menyangkut pekerjaan golongan ekonomi lemah, seperti petani gurem, buruh dan buruh tani atau lainnya sebagaimana yang terdapat di Desa Brodot ini, tidak ada pemisahan secara tegas dalam strukturnya sebagaimana pada sektor-sektor pekerjaan modern. Seorang petani gurem di desa ini tidak jarang juga bekerja sebagai buruh bangunan atau tukang perahu, demikian juga halnya pada golongan buruh tani. Akan tetapi, jenis-jenis pekerjaan itu relatif bisa dipisahkan, sejauh hal itu menyangkut jenis pekerjaan yang diakui yang bersangkutan sebagai pekerjaan pokok, terutama kalau dikaitkan dengan catatan-catatan administrasi resmi.

Sosial Ekonomi Tukang Perahu dan kelompok sosial yang lain

Sehubungan diketahui bahwa luas tanah yang diusahakan untuk pertanian di Desa Brodot mencapai 354.182 Ha dan dalam hal ini padi merupakan hasil pertanian yang utama karena dianggap jenis tanaman yang hasilnya paling menguntungkan dibandingkan dengan jenis tanaman lain seperti palawija, tebu dan sebagainya.

Dari petani pemilik yang berjumlah 1.351 orang, jika dihubungkan dengan luas tanah milik perorangan yang ada, yakni 279,8830 Ha, maka rata-rata pemilikan usaha tani hanya seluas 0,2000 Ha. Namun dalam kenyataannya, pemilikan tanah usaha tani di desa ini tidak sama untuk setiap orang atau tidak merata.

Luas tanah milik rakyat atau perseorangan yang ditandai oleh usaha tani yang luasnya sempit-sempit, rata-rata di bawah 0,5 Ha tersebut, sekali lagi jika dipakai ukuran dari Masri Singarimbun atau penelitiannya di Sriharjo, dikategorikan sebagai kurang memenuhi syarat untuk hidup cukupan bagi pemilikinya,⁷ dan sedikit sekali penduduk desa ini yang memiliki tanah seluas lebih dari 1 Ha.

Pada umumnya, ada satu ciri utama yang menandai kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan, yaitu struktur pemilikan atau penguasaan tanahnya. Ini berarti, hak-hak penggunaan tanah yang berbeda-beda menentukan keadaan ekonomi seseorang, yang sejak dulu merupakan ukuran tingkat kedudukan sosial seseorang di pedesaan.

Di Desa Brodot ada 3 macam kelompok atau golongan masyarakat yang masing-masing berbeda kedudukan sosial ekonominya didasarkan atas pemilikan tanah, dan sekaligus juga menggambarkan sistem hirarki atau pelepasan sosial tradisional yang ada. Ketiga kelompok atau golongan tersebut adalah, Petani Kenceng, yaitu mereka yang mempunyai sawah, pekarangan dan rumah, Petani Setengah Kenceng, yaitu petani yang mempunyai rumah dan pekarangan, Petani Ngindung, yaitu mereka yang memiliki rumah di atas pekarangan orang lain. Seringkali mereka tidak mempunyai apa-apa, dari umumnya dari kaum pendatang.

Kemudian di sisi lain, ada istilah petani gurem, yaitu yang menggarap tanah miliknya sendiri (pemilik penggarap), kelompok penggarap (tidak memiliki tanah, tetapi menggarap tanah milik orang lain) serta kelompok buruh tani (tidak memiliki tanah sama sekali), hampir mencirikan sebagian besar struktur pekerjaan di sektor pertanian yang tersedia. Pada kelompok petani gurem, karena sempitnya tanah yang dimiliki, dalam hal penggunaan

⁷ Masri Singarimbun dan DH. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan, Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara 1984), 3.

tenaga kerja keluarga untuk menggarap sawahnya lebih besar dan sering dibandingkan penggunaan tenaga kerja luar keluarga (para buruh tani). Hal ini bisa dimengerti mengingat sempitnya tanah garapan yang mereka miliki, sehingga jika menggunakan buruh-buruh tani dalam menggarap sawahnya tersebut, maka tentu biaya yang harus dikeluarkan menjadi tidak proporsional terhadap hasil tanah atau surplus yang mereka peroleh. Di pihak lain hal ini tentu saja mengurangi kesempatan kerja para buruh tani yang ada. Gejala semacam ini ternyata lebih diperburuk oleh adanya kecenderungan dari para petani gurem yang sering menebaskan sawahnya (menyerahkan bagian hasil produksi usaha taninya sebelum panen kepada perantara atau penebas untuk mendapatkan uang tunai, melalui transaksi), karena para penebas, yang biasanya datang dari luar desa, tidak jarang membawa buruh penderep sendiri dalam melakukan panen. Bagi buruh penderep yang kebanyakan terdiri dari para wanita ini, hal ini tentu mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan bawon, yaitu upah nderep yang berupa hasil bumi. Akan tetapi semenjak digunakannya sabit dalam menyelenggarakan panen untuk mengganti ani-ani yang biasa digunakan oleh penderep, dengan adanya sistem tebasan ini kesempatan kerja juga berkurang bagi buruh laki-laki yang biasanya lebih layak menggunakan alat sabit.⁸

Sistem tebasan ini memang merupakan sebuah fenomena dalam pola hubungan kerja tradisional di sektor agraris, artinya bahwa kalau dahulu para pemilik tanah dalam komunitas petani tidak lepas dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab sosialnya, yaitu prinsip saling menolong sebagai manifestasi hubungan patron-klien antara pemilik tanah dengan buruh tani, maka dengan adanya tebasan ini pola hubungan tersebut semakin memudar.⁹

Sebenarnya akibat-akibat sosial semacam ini tidaklah dikehendaki oleh para petani pemilik tanah sempit tersebut. Tebasan yang mereka lakukan adalah karena keterpaksaan belaka.

⁸*Observasi*, Brodot, Juni 2014 (Yakni musim panen padi tahun 2014)

⁹ Soehardi, *Tebasan Subsistem Desa dan Kesempatan Kerja*, dalam "Jurnal Gema Antropologi", No. 4 dan 5", Yogyakarta: 1977, 28.

Tidak jarang mereka ini terdesak oleh kebutuhan akan uang tunai untuk misalnya, biaya pendidikan anak-anaknya, membayar pajak dan sebagainya, sehingga tebasan merupakan satu-satunya cara yang paling mungkin yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi desakan kebutuhan itu. Alasan-alasan ekonomis-praktis juga merupakan satu hal yang mendorong mereka melakukan tebasan, artinya bahwa secara riil cara itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggarap sendiri sepenuhnya, mulai dari proses penanaman sampai memasuki pasca panen, dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mengingat pula usaha tani mereka yang sudah teramat sempit (gurem), maka jelas mereka tidak mempunyai kemampuan membayar atau memberi imbalan kepada buruh sabit ataupun penderep yang harus disewa.

Adapun cara yang ditempuh oleh golongan petani gurem ini dalam usahanya mendapatkan nafkah dari sektor pertanian, walaupun dengan usaha yang lebih realistis dan ekonomis, tidak berarti kebutuhan-kebutuhan hidup mereka menjadi sepenuhnya tercukupi mengingat sempitnya rata-rata luas tanah yang mereka miliki, yaitu dibawah 0,5 Ha.

Di samping padi sebagai tanaman utama bagi para pemilik tanah, tebu juga merupakan jenis tanaman lain yang ditanam pada musim-musim tertentu. Sejak adanya program Tebu Rakyat Intensifikasi, Desa Brodot juga mendapat jatah menanam tebu, dengan menyediakan tanah seluas 40 Ha sampai 60 Ha untuk setiap musim. Dalam hal rotasi tanamnya, tanah-tanah yang mendapat giliran ditanami tebu adalah tanah-tanah yang telah ditanami pada 5 sampai 7 kali, untuk kemudian ditanami tebu 1 kali, demikian seterusnya. Tanaman tebu ini biasanya berumur 13 hingga 16 bulan mulai dari persiapan hingga penebangan. Mengingat relatif lamanya umur tebu yang ditanam, maka pada saat musim tebu, produksi padi di desa ini menjadi berkurang. Bagi pemilik tanah yang biasa mengkonsumsi sendiri hasil tanaman padinya (subsisten), maka selama tanahnya ditanami tebu, mereka biasanya mendapatkan beras dengan cara membeli kiloan dari pasar atau pedagang. Hal ini terutama sekali dilakukan oleh golongan petani gurem, karena hasil tanah yang mereka peroleh tidak cukup untuk dipakai sebagai persediaan selama mereka menanam tebu.

Tanaman Tebu tersebut, dalam proses pengerjaannya dilakukan sendiri oleh rakyat sebagai pemilik tanah, dan mereka digabung menjadi kelompok-kelompok. Dalam pengelolaannya, mereka dibimbing oleh sinder, mandor atau tenaga administratif lainnya yang berpengalaman mengelola tebu pabrik. Untuk proses penggarapannya, dalam hal ini dibutuhkan buruh-buruh tani, khususnya dari desa itu sendiri (ini merupakan kesempatan kerja musiman bagi mereka sebagai kaum buruh), sedangkan untuk biaya penggarapan, para petani tersebut mendapat bantuan dari Bank berupa pinjaman uang dengan bunga rendah yang harus dikembalikan saat setelah panen.

Kelompok miskin lainnya yang ada di desa ini yang telah sedikit disinggung di muka, adalah kelompok petani penggarap, yaitu orang-orang yang tidak memiliki tanah tetapi menggarap tanah milik orang lain, biasanya milik petani kaya (kuli kenceng) atau milik pamong desa. Mereka ini disebut juga sebagai petani bagi hasil, artinya dalam menggarap tanah milik orang lain tersebut, hasil tanah yang diperoleh dibagi bersama menurut bagian masing-masing pihak (pemilik tanah penggarap) berdasarkan perjanjian yang telah melalui transaksi. Biasanya transaksi ini ditentukan sendiri oleh pemilik tanah, apakah dengan sistem maro, mertelu, mrapat atau lainnya.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan semakin banyaknya orang yang tidak mendapatkan tanah garapan di sini, terutama untuk mereka yang disebut sebagai petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil, antara lain dan terutama adalah karena terjadi ketidak-seimbangan dalam penguasaan tanah. Di satu pihak petani kaya/ kuat semakin banyak menguasai tanah (membeli/ menyewa), sehingga akibatnya dipihak lain adalah berkurangnya kesempatan bagi petani penggarap untuk mendapatkan tanah untuk diusahakan.¹⁰

Atas dasar itu, sebagai suatu pola hubungan kerja tradisional antara pemilik tanah-penggarap, keadaan ini nampaknya memperlihatkan suatu manifestasi adanya *patroange* (hubungan patron-klien) dalam komunitas mereka, artinya para petani yang tidak memiliki tanah masih punya kemungkinan mempertahankan

¹⁰Moh. Rofik, *Wawancara*, Brodot, 6 Juli 2014

hidup dengan menggarap tanah milik orang lain. Akan tetapi, dengan melihat kenyataan yang ada sekarang ini, nampaknya pola hubungan kerja tersebut bukan lagi pola hubungan yang dilandasi suatu tanggung jawab sosial pemilik tanah kepada penggarap, artinya keadaan ini lebih mengarah pada sistem hubungan yang bersifat komersial rasional. Misalnya, pada sistem bagi hasil *maro* (separoh-separoh) yang umum dilakukan di desa ini, yaitu bahwa *maro* yang seharusnya saling menguntungkan, justru banyak merugikan penggarap. Tidak jarang terjadi sebelum mendapatkan hak menggarap dengan *maro* itu, si penggarap harus terlebih dahulu memberikan uang sebagai uang kunci (*srama*) untuk si pemilik tanah. Hal ini berbeda dengan perjanjian bagi hasil pada masa-masa sebelumnya, yaitu transaksi didasarkan menurut hasil tanah. Kenyataan ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan Sajogyo, yang mengatakan bahwa setelah tahun 1970-an, sistem bagi hasil antara petani pemilik dengan petani penggarap sangat tidak seimbang, yaitu pemilik memperoleh 6 kg beras per hari per hektar untuk satu musim, sedangkan penggarap hanya menerima 1.5 kg beras. Persaingan yang keras antara sesama petani untuk mendapatkan pekerjaan, telah mengakibatkan tingkat upah menurun dan mereka terpaksa berbagi-bagi kemiskinan.¹¹

Dari berbagai macam sistem bagi hasil yang terdapat di daerah penelitian, yang akan sedikit dibicarakan di sini adalah sistem bagi hasil *mertelu*, yaitu perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1:2. Alasan untuk ini adalah karena menyangkut latar belakang sosial-ekonomi dari salah seorang responden yang berstatus sebagai petani penggarap dengan bagi hasil *mertelu*.

Pada perjanjian bagi hasil dengan sistem *mertelu*, atas penyerahan tanah garapan mereka, para pemilik tanah menerima 2/3 bagian dari hasil panen. Si penggarap tanah, yang harus menanggung alat-alat serta biaya produksi atau biaya-biaya lainnya, memperoleh sisanya, yaitu 1/3 bagian dari hasil panen. Yang dimaksud dengan biaya produksi, menurut Hartoyo, adalah besarnya biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani dalam

¹¹ Sajogyo, *Pendekatan Kebutuhan Dasar Manusia Bagi Perbaikan Keadaan Gizi Kaum Miskin*, dalam Jurnal "Agro Ekonomika", (Yogyakarta: Agustus (XII) Perhepi 1981, 8.

proses produksi, meliputi biaya sarana produksi dan biaya tenaga luar keluarga.

Luas tanah garapan yang digarap oleh petani *mertelu* ini pada umumnya sebesar 0,25 Ha. Jadi masih tergolong ke dalam usaha tani gurem. Hal ini disebabkan biasanya produksi yang harus ditanggung menjadi lebih besar jika tanah yang digarap lebih besar dari ukuran rata-rata tersebut. Pada dasarnya luas tanah garapan tidak banyak berpengaruh terhadap hasil tanah yang diperoleh penggarap, artinya, tidak berarti semakin luas tanah yang digarap, penggunaan sarana produksi menjadi lebih hemat dan hasilnya lebih baik.

Seperti halnya petani *gurem*, petani penggarap di sini sering pula menebaskan sawah garapannya. Ini berarti yang bersangkutan harus kehilangan sebagian besar hasil panen dari jerih payahnya selama ini, karena penebas selalu menaksir harga lebih rendah, bahkan sering jauh lebih rendah dari harga pasar terhadap hasil panennya itu. Pada umumnya, hal-hal yang mendorong mereka menebaskan sawah garapannya hampir tidak berbeda dengan yang mendorong petani *gurem*, yaitu karena desakan kebutuhan akan uang tunai. Dalam hal ini, akibat yang sama juga harus menimpa para buruh tani, khususnya penderep atau buruh sabit, karena penebas dalam hal ini pun sering membawa sendiri kedua jenis buruh tersebut.

Kelompok miskin lainnya yang juga sama sekali tidak memiliki tanah adalah mereka yang disebut sebagai buruh tani. Pekerjaan yang tersedia untuk mereka di sektor pertanian adalah pekerjaan yang sama sekali padat tenaga, karena hanya tergantung dari upah berburuh sebagai sumber penghasilan pokok. Dalam strata sosial di sektor agraris, buruh tani ini termasuk golongan *magersari*, yaitu golongan yang tidak memiliki tanah sawah atau tanah garapan lainnya dan tinggal di rumahnya sendiri di atas pekarangan orang lain (*ngindhung*).

Dalam konteks struktur pemilikan maupun penguasaan tanah, terciptanya kaum buruh tani ini tidak lepas dari kenyataan adanya konsentrasi atau pemusatan pemilikan (melalui jual beli) ataupun penguasaan tanah (melalui persewaan) pada kelompok-kelompok petani kaya, sehingga kelompok petani miskin yang jumlahnya lebih besar harus bersaing untuk memperoleh tanah

garapan yang jumlahnya sangat terbatas. Situasi semacam ini menyebabkan hanya mengandalkan upah atas kerja mereka sebagai buruh pada petani yang mempunyai tanah garapan. Akan tetapi, secara khusus munculnya buruh tani di desa ini juga merupakan hasil sejarah, yaitu sejarah perkembangan struktur pemilikan tanah pertanian di desa itu sendiri. Telah disinggung di bagian pendahuluan dalam tulisan ini bahwa tanah rakyat atau tanah perseorangan di Desa Brodot berstatus yasan yang merupakan ciri status pemilikan pada umumnya di daerah-daerah bekas kekuasaan Kerajaan Mataram. Tanah Yasan merupakan bagian dari tanah milik desa yang (berdasarkan *reform* pemerintah kolonial Belanda serta UUPA 1960) diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat kecil yang sudah lama tinggal di desa itu. Oleh karena tanah yang diberikan ini pada umumnya sempit-sempit, maka bagi anggota masyarakat yang menajak dewasa atau generasi berikutnya tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa memiliki tanah. Dengan didukung pula oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, maka bisa diduga akibatnya mengapa sekarang di desa ini terdapat banyak orang yang sama sekali tidak memiliki tanah, dalam hal ini yaitu orang-orang yang hanya bekerja sebagai buruh tani.¹²

Kesempatan kerja di sektor agraris untuk buruh tani sangat bervariasi, tetapi pada umumnya memiliki ciri sama, yaitu padat tenaga. Di dalam komunitas mereka, ada semacam ketergantungan dari buruh-buruh tani ini kepada golongan petani pemilik tanah, khususnya golongan pemilik tanah luas, artinya mereka yang lebih sering menawarkan tenaganya pada pemilik tanah, dan pemilik tanah diharapkan dapat selalu memberikan jaminan ekonomi minimal kepada buruh-buruh tani tersebut. Dengan adanya ketergantungan semacam ini dan besarnya jumlah buruh tani yang ada, maka para petani pemilik tanah luas bebas menentukan tingkat upah untuk mereka. Pola hubungan ini jelas berbeda dengan, dan merupakan pergeseran dari pola hubungan patron-klien, yang merupakan hubungan saling memerlukan dan berimbang, dan di sini buruh tani mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap

¹²H. Multazam (sesepuh petani desa Brodot, Kelahiran 21 Agustus 1921) , *Wawancara*, 3 Agustus 2014.

pemilik tanah luas dalam pencapaian keputusan tingkat upah yang dikehendaki kedua belah pihak.

Implikasi dari adanya kenyataan di atas adalah munculnya persoalan yang meyangkut kesempatan kerja dan permintaan tenaga kerja mereka di sektor pertanian. Dan di Desa Brodot implikasi tersebut antara lain bahwa para petani kaya hampir tidak pernah terdorong untuk menaikkan tingkat upah mereka; sedangkan petani-petani jenis *gurem* cenderung mengerahkan tenaga kerja keluarga sendiri dan mengurangi penggunaan buruh upahan, mengingat usaha tani mereka sudah teramat sempit (usaha

kecil jelas tidak mempunyai kemampuan membayar tunai pekerjaan yang harus disewa). Juga dengan adanya sistem tebasan dan munculnya traktor di desa ini, maka kesempatan kerja untuk mereka di pedesaan ini (baik untuk buruh laki-laki maupun buruh wanita) sedikit sekali yang tersisa, sementara sektor pekerjaan lain non agraris yang ada di desa ini juga sangat terbatas.

Akhirnya, dengan melihat kenyataan-kenyataan sosial ekonomi yang ada dan tengah terjadi di desa penelitian tersebut, maka untuk ketiga kelompok sosial yang telah diuraikan tadi, pendapatan yang berasal dari kegiatan non pertanian (khususnya di sektor perkotaan) merupakan tambahan pendapatan yang sangat penting artinya.¹³

1. Pak Sutoyo Gambaran Seorang Petani Gurem

Pak Sutoyo mengaku berumur 42 tahun, tetapi dengan badannya yang agak bungkuk serta kerut-merut di wajahnya memperlihatkan dia seperti sudah 50an tahun. Kerja keras di sawah, juga ditambah dengan kerja keras sebagai tukang perahu, rupa-rupanya telah membuat ia tampak lebih tua. Ia dilahirkan di Dukuh Klaci, dukuh tempat tinggalnya sekarang ini, sedangkan istrinya berasal dari desa lain. Keempat anaknya juga dilahirkan di dukuh ini dan semuanya masih menjadi tanggungannya dan tinggal serumah di rumah warisannya sekarang. Keempat anaknya itu masih sekolah, antara lain di SMP Bandarkedungmulyo kelas 2 untuk yang tertua dan yang terkecil di SD Negeri kelas 1, sedangkan dia sendiri hanya

¹³Observasi, Brodot, 3 Agustus 2014.

sampai tamat SD. Setelah kawin, Pak Sutoyo sebagai anak tunggal (dua saudaranya yang lain meninggal saat dilahirkan) tetapi merawat kedua orang tuanya sampai sekarang.

Satu-satunya sumber nafkah yang diandalkan Pak Sutoyo di desanya adalah tanah sawah seluas 120 boto/ru atau 0,12 Ha. (1 banon = 1 m x 14 m) milik orang tuanya (tanah ini belum diwariskan kepadanya mengingat kedua orang tuanya masih hidup). Sedangkan istrinya sehari-hari hanya dirumah mengurus anak-anaknya dan sesekali mengontrol tanaman di sawah.

Oleh karena tanah yang dimiliki itu jenis tanah sawah kering, maka dalam hal rotasi tanam, tanah tersebut hanya dapat ditanami padi dua kali dalam satu tahun dan satu kali palawija, juga tanaman Tebu satu kali setiap 5 tahun. Jadi padi di sini merupakan jenis tanaman utama bagi Pak Sutoyo walaupun dirasakan tidak menguntungkan karena hasil tanah yang diperolehnya tidak begitu banyak dilihat dari biaya produksi yang telah dikeluarkan, sehingga hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri.¹⁴

Bagi seorang petani Pak Sutoyo, biaya produksi yang harus dikeluarkan jika melakukan intensifikasi sebagaimana yang dianjurkan pemerintah tentu diluar kemampuannya, sementara biaya produksi yang harus dikeluarkan selama ini untuk usaha taninya yang terhitung sederhana itupun sering kali didapatkannya dengan hutang kepada orang lain, dan itu biasanya ia kembalikan dengan uang hasil penjualan sebagian dari hasil panen. Sebenarnya biaya produksi itu bisa diperoleh lewat fasilitas berupa kredit yang disediakan oleh Bank atau Koperasi. Akan tetapi, menurut pengakuan Pak Sutoyo, kredit Bank yang ada di desanya cenderung lebih diperuntukkan bagi golongan petani dengan penguasaan tanah garapan di atas 0,26 Ha. Hal ini, menurutnya, disebabkan adanya peraturan dari pelaksana Bimas yang memberikan batasan minimum 0,25 Ha untuk dapat mengikuti kredit Bank.¹⁵

¹⁴*Observasi*, Brodot, 10 Agustus 2014

¹⁵Sutoyo, *Wawancara*, Khlaci Desa Brodot , 3 Agustus 2014

Penggunaan tenaga kerja luar keluarga untuk usaha tani seluas 9,12 Ha. tersebut hanya terbatas dalam soal menanam dan membajak tanah, sedangkan untuk pekerjaan lainnya lebih banyak dikerjakan sendiri. Untuk keperluan membajak, Pak Sutoyo menggunakan jasa traktor yang disediakan oleh Koperasi karena dipandang lebih efisien dan cepat selesai. Bagi petani *gurem* semacam Pak Sutoyo ini, tidak sempat terfikirkan dalam benaknya akan akibat-akibat sosial yang mungkin timbul atas pilihan ekonomisnya menggunakan jasa traktor tersebut, yang dengan ini berarti kesempatan kerja bagi buruh-buruh tani di pedukuhannya menjadi semakin terbatas. Barangkali ini sebuah alasan yang bisa dimaklumi ketika dia karena pertimbangan ekonomis semata-mata dan terlalu berat baginya jika harus mengupah buruh-buruh itu, juga seperti yang dikatakannya sendiri, pada dasarnya kehidupan ekonominya tidak lebih sama dengan para buruh itu dan merekapun tentu maklum dengan apa yang ia lakukan. Efisiensi dari penggunaan traktor dibandingkan dengan menggunakan tenaga buruh menurut perincian Pak Sutoyo sebagai berikut: untuk menyiapkan tanah garapannya agar siap untuk ditanami, paling tidak ia harus memperkerjakan 4 orang buruh untuk ngluk dan nggaru, dan selesai dalam waktu 2 hari. Upah yang harus dikeluarkan untuk tiap orang buruh Rp 40.000,- per hari, ditambah makan 1 kali; sehingga biaya total yang dikeluarkan mencapai Rp 240.000,-. Tanah yang sudah diolah tersebut tidak bisa langsung ditanami atau harus diistirahatkan untuk beberapa hari. Bila menggunakan traktor, semua pekerjaan itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu kurang lebih dua jam saja, dan biaya dikeluarkan untuk itu Rp 200.000,-, ditambah makan 1 kali untuk si tukang traktor. Secara ekonomi, cara yang terakhir ini tentu lebih efisien.

Secara keseluruhan, biaya produksi total (termasuk biaya untuk berbagai sarana produksi seperti bibit, obat-obatan, pupuk dan sebagainya) yang harus dikeluarkan untuk tanah seluas 0,12 Ha, menurut perhitungan Pak Sutoyo, mencapai kurang lebih Rp 300.000,- untuk setiap musim (jumlah ini merupakan jumlah rata-rata dari biaya produksi pada musim hujan dan biaya produksi pada musim kering; dan

biaya produksi untuk kedua musim ini sebenarnya terpaut sedikit).¹⁶

Maka atas jerih payah Pak Sutoyo selama ini dalam menggarap sawahnya yang terhitung marginal karena kurangnya biaya produksi, untuk tanah yang hanya seluas 0,12 Ha tersebut, hasil panen yang diperoleh Pak Sutoyo untuk setiap musim rata-rata laku dijual Rp 1800.000,-. Selanjutnya, bila itu dikurangi dengan biaya produksi, maka hasil bersih yang diperolehnya sebesar Rp 1300.000,- untuk setiap musim. Dengan demikian, kalau dalam 1 tahun dilakukan 2 kali panen, pendapatan rata-rata yang diterima Pak Sutoyo untuk tanaman padinya (jenis tanaman yang dipandanginya lebih menguntungkan dibandingkan palawija atau tebu) atas tanah seluas 0,12 Ha tersebut hanya Rp 200.000,- per bulan.

Akhirnya, dengan sedikitnya surplus yang bisa diperoleh untuk hidup layak, untuk selanjutnya Pak Sutoyo terpaksa hanya mengkonsumsi sendiri panennya untuk persediaan makan selama satu musim, walaupun itu seringkali tidak terpenuhi. Hal ini ia lakukan terutama setelah pendapatan yang diperolehnya dari sektor lain yang non agraris sebagaimana sekarang sebagai tukang perahu, dirasakan relatif cukup, walaupun pas-pasan.¹⁷

2. *Pak Jausin Gambaran Seorang Petani Penggarap*

Barangkali tidak terlalu salah ketika Pak Jausin (40 tahun) mengatakan bahwa pekerjaan yang digelutinya sekarang ini sebagai petani penggarap, di samping sebagai tukang perahu, merupakan nasib buruk yang harus diterimanya. Sejak beristerikan Sumini (29 tahun), kini Pak Jausin yang berputra 3 orang itu tinggal bersama ibu mertuanya di Pedukuhan Brodot. Dia sendiri berasal dari Pedukuhan lain. Kini ibunya yang sudah menjanda, masih tetap tinggal di sana bersama 2 saudara perempuannya. "Nasib Buruk" itu menurutnya adalah karena kedua orang tuanya tidak sempat mewariskan tanah sawah yang pernah mereka miliki, yang kemudian sesudah itu ibunya

¹⁶ Wawancara..., 10 Agustus 2014

¹⁷ Sutoyo, Wawancara, Dusun Klaci, 17 dan 24 Agustus 2014

terpaksa bekerja keras menghidupi sendiri anak-anaknya, dengan bekerja sebagai bakul, di samping tetap mengandalkan sawah peninggalan mendiang suaminya. Entah apa sebabnya, beberapa waktu kemudian, sawah satu-satunya seluas 270 boto atau kurang lebih 0,27 Ha peninggalan suaminya itu oleh ibunya dijual, kemudian Pak Jausin melanjutkan pekerjaan sebagai petani penggarap, yaitu *mertelu*.

Dibandingkan dengan sistem bagi hasil lainnya, sistem *mertelu* ini adalah yang paling mungkin dan mampu ia lakukan, sebab dengan sistem *maro*, misalnya, yang secara teoritis (seharusnya) lebih menguntungkan, tentu ini lebih memberatkannya karena, sudah menjadi kebiasaan di desanya, si penggarap harus terlebih dahulu memberikan uang “kunci” (*srama*) kepada pemilik tanah lainnya yang ada, misalnya *mrapat* atau *marwolu*, praktis si penggarap tidak lebih hanya sebagai buruh belaka bagi pemilik tanah, karena pemilik tanahlah yang menyediakan atau menanggung semua biaya serta alat produksi.¹⁸

Luas tanah garapan yang biasa dipilik Pak Jausin terhitung sempit, yaitu hanya seluas 230 boto atau sekitar 0,23 Ha. Alasan lain untuk ini nampaknya cukup rasional bagi Pak Jausin, yaitu bahwa jika dipilih tanah garapan yang lebih luas, tentu modal untuk biaya produksi yang dibutuhkan menjadi lebih besar dan dia tidak cukup mampu untuk itu.

Usaha-usaha yang dilakukan Pak Jausin untuk mendapatkan hasil yang baik antara lain dengan menggunakan sarana-sarana produksi diperlukan secara memadai, misalnya menggunakan bibit jenis *bramu* yang hasilnya lebih banyak dan lebih tahan hama (padi jenis ini biasanya tidak dikonsumsi sendiri, melainkan untuk dijual karena rasanya kurang disukai oleh petani-petani setempat); penggunaan pupuk serta obat anti hama secara teratur dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal penyiapan lahan, walaupun tersedia traktor di desa ini, Pak Jausin lebih suka menggunakan tenaga *ngluku/nggaru*, karena menurut pendapatnya, traktor merusak kesuburan tanah.

¹⁸ Jausin, *Wawancara*, Brodot, 31 Agustus, 2014

Secara keseluruhan, menurut perhitungan Pak Jausin, rata-rata jumlah produksi yang harus dikeluarkannya untuk tanah garapan seluas 0,23 Ha. Pada setiap musim mencapai sekitar Rp 500.000,-. Pada saat-saat panen, hasil tanah yang diperolehnya (gabah kering) laku dijual dengan harga sekitar Rp 1500.000,- untuk satu musim (untuk Desember - April tahun 2013/2014 yang lalu). Dengan perhitungan secara kasar, jika uang sebesar itu dikalikan 1/3 dan kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya produksi, maka pendapatan bersih yang diterima Pak Jausin setiap musim sekitar Rp 2.660.000,-. Dan kalau tanah seluas 0,23 Ha itu digarap Pak Jauhari selama 4 musim dalam waktu 2 tahun, maka pendapatan yang diperolehnya untuk setiap bulan hanya sekitar Rp 100.000,-. Namun tidak tertutup kemungkinan pendapatan yang ia peroleh bisa menjadi lebih kecil lagi kalau ternyata hasil panennya menurun. Bahkan lebih jauh dari itu, jika tanaman padinya terserang hama wereng atau tikus, maka kerugianlah yang mesti diterimanya. Kemudian, resiko lain adalah jika desanya sedang musim tanam tebu yang memakan waktu satu tahun lebih itu, maka hampir pasti ia kehilangan pekerjaan.

Pak Jausin juga pernah mengaku menebaskan tanaman padinya, terutama pada saat-saat ia benar-benar sedang membutuhkan uang tunai, sehingga cepat-cepat menguangkan hasil panennya yang sebenarnya belum siap untuk dipetik itu. Walaupun pada saat ia sedang terdesak kebutuhan akan uang tunai tersebut padi sudah bisa dipetik, pun ia tidak bisa segera menjualnya ke Koperasi, karena bagaimanapun penggarap juga harus mengeringkan gabah untuk mengurangi kandungan air sesuai dengan standar yang dituntut Koperasi tersebut. Oleh karena itu, kehadiran penebas/pembeli padi hidup di sawah, mereka biasanya juga sebagai pedagang atau pemborong beras, memang di sisi lain mereka juga dibutuhkan, terutama pada saat-saat yang mendesak seperti itu. Transaksi yang dilakukan penggarap terhadap penebas, dalam hal ini harus mendapatkan kesepakatan dari pemilik tanah. Syarat-syarat yang dituntut penebas ini biasanya lebih merugikan pihak penggarap, tetapi bagi pemilik tanah hal ini tidak begitu terasa. Dengan

demikian, jerih payah penggarap selama ini sebagai orang yang menanggung semua biaya produksi, menjadi sia-sia.¹⁹

3. *Pak Mat Basoni Gambaran Seorang Buruh Tani*

Pak Basoni (45 tahun), seorang buruh tani di pedukuhan Delik Desa Brodot. Apa yang dirasakannya selama 16 tahun terakhir sebagai buruh tani adalah bahwa hari ke hari semakin berkurang orang-orang yang memanfaatkan tenaganya. Tentunya ia tidak butuh untuk tahu mengapa terjadi demikian. Yang jelas, menurut Pak Basoni, apa yang sedang dialaminya sekarang adalah “resiko” dari orang-orang yang diturunkan dari lingkungan buruh tani, maksudnya bapak dan simbok (ibu) yang melahirkannya dulu juga buruh tani.

Kini Pak Basoni yang beristrikan Wagiyem (35 tahun) itu tinggal di sebuah rumah sederhana di pekerangan orang lain bersama 2 anaknya yang masih SMP kelas 1 dan SD kelas 5. Seorang anaknya lagi, yaitu yang tertua dan tamatan SD, tinggal bersama salah seorang kerabatnya di daerah Sidoarjo dan bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik roti. Pak Basoni sendiri hanya sempat duduk di bangku kelas 4 SD.²⁰

Penghasilan yang diperoleh Pak Basoni sebagai buruh tani, sekalipun dibantu oleh istrinya yang bekerja sebagai buruh tanam, jauh dari kecukupan, artinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimalnya, kalau tidak dibantu dengan penghasilan tambahan yang diperolehnya sebagai buruh serabutan di desanya, dan dengan inipun dirasakannya masih kurang memadai. Di sektor pertanian ini, beberapa macam pekerjaan yang biasa Pak Basoni lakukan antara lain: *mencakul, ngluku, nggaru, mbabat* dan beberapa macam pekerjaan lainnya padat tenaga. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan itupun tidak jarang menjadi berkurang, karena kebanyakan para pemilik tanah lebih suka mengerahkan tenaga kerja keluarga sendiri, dan juga harus bersaing dengan berbagai sarana dan mekanisme pertanian, traktor misalnya. Tetapi, sekalipun pekerjaan itu diperolehnya, tidak jarang upah

¹⁹ Jausin, *Ibid*, Brodot, 7 dan 14 Agustus 2014.

²⁰ Basoni, *Wawancara*, Dukuh Delik, 26 Oktober 2014

yang ia terima kurang dari Rp 35.000,- per hari (upah rata-rata pada umumnya Rp 35.000,- per hari ditambah makan siang dan makan kecil) karena tenaganya memang tidak sangat dibutuhkan oleh para pemilik tanah. Pada musim tebu, kesempatan memperoleh nafkah bagi buruh tani menjadi agak terbuka sekalipun sangat jarang, karena pada saat-saat seperti ini tenaga kerja luar keluarga sangat dibutuhkan oleh para pemilik tanah yang mendapat jatah menanam tebu. Upah yang diterima Pak Basoni pada musim tebu ini rata-rata Rp 35.000,- per hari, dan jika pemilik tanah termasuk golongan petani kaya, upah yang diterima bisa lebih dari itu (paling tinggi Rp 50.000,-).

Menurut Pak Basoni, pendapatan rata-rata yang diterimanya untuk segala macam pekerjaan pertanian, mencapai sekitar Rp 2.310.000,- untuk setiap musim (3 bulan) pada masa tanam padi 2014 yang lalu. Sedangkan penghasilan tambahan yang diperolehnya sebagai buruh serabutan dirasakan tidak banyak membantu dan cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesaat saja. Jika dalam 1 tahun terdapat 2 musim, maka penghasilan yang diperoleh Pak Basoni hanya sekitar Rp 770.000,- untuk setiap bulan.

Maka dengan perolehan ekonomi yang sangat tidak memadai itu, pekerjaan di luar sektor pertanian menjadi suatu alternatif yang sangat berarti bagi Pak Basoni yang selama ini hanya mengandalkan upah dari pekerjaan buruh taninya.²¹

Menjadi Tukang Perahu Sebagai Sumber Penghasilan Lain dari Sektor Non Pertanian

Dengan melihat ketiga gambaran yang mengungkapkan persoalan hidup seorang tadi, yang segera terbayang dalam pikiran kita tidak lain adalah sebuah “potret kemiskinan” mereka. Mengetahui berapa banyak penghasilan nyata yang mereka peroleh secara rata-rata setiap bulannya dari sektor pertanian di desanya, maka sulit dibayangkan bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhan hidup, sekalipun hanya untuk mempertahankan kebutuhan yang paling minimal, mempertahankan kebutuhan yang

²¹Basoni, *Ibid*, Dusun Delik, 26 Oktober 2014

paling minimal, mempertahankan kehidupan, ditengah-tengah kekuatan-kekuatan ekonomi maupun perubahan sosial yang sedang melanda pedesaan sekarang ini.

Dimensi sosial-ekonomi di pedesaan saat ini yang diwarnai oleh adanya komersialisasi usaha tani, sempitnya tanah pertanian yang tersedia serta padatnya penduduk, semakin pudarnya ikatan-ikatan komunitas dalam struktur sosial mereka dan sebagainya, tidak banyak lagi memberi kemungkinan bagi golongan miskin yang ada, baik yang bertambah sempit seperti Pak Sutoyo maupun yang sama sekali tidak bertanah seperti Pak Jausin dan Pak Basoni, untuk mendapatkan kesempatan kerja serta perolehan ekonomi lainnya secara layak dari sektor agraris di desanya.

Jika digali lebih jauh, pada dasarnya struktur sosial di pedesaan itu sendiri sering menentukan pokok permasalahannya, artinya persoalan ekonomi yang dihadapi golongan miskin tersebut tidak lepas dari pola-pola hubungan sosial antara kelompok-kelompok sosial yang ada dan sedemikian rupa dalam komunitas petani di pedesaan di mana kelompok-kelompok tersebut berada. Ada satu taraf perkembangan masyarakat Jawa di pedesaan disebut sebagai “involusi”, atau rumit di Pulau Jawa yang sudah demikian padat penduduknya serta sangat terbatasnya sumber daya sektor pertanian, juga sangat sempitnya lapangan kerja di bidang industri, di manapun penduduk golongan miskin di pedesaan masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling minimal, kebutuhan ‘asal dapat makan’ (subsistens). Kunci ‘daya tahan’ golongan miskin ini adalah karena di pedesaan berkembang semacam mekanisme ekonomi yang menjurus kepada situasi involusi, artinya dalam situasi ekonomi yang semakin menekan, maka masyarakat pertanian di pedesaan Jawa menciptakan semacam mekanisme ekonomi (juga sosial-budaya) yang mampu menyerap setiap tambahan tenaga kerja. Dalam mekanisme ekonomi semacam itu, tentu saja hampir tidak ada produktivitas pada usaha tani mereka karena dibebani dengan masukan tenaga kerja yang terlalu banyak,²² dan mekanisme ini merupakan cara mereka meredistribusikan serta

²² Usaha tani yang ‘terkena’ involusi semacam ini (sebagai akibat penetrasi kolonialisme di pedesaan), menurut Greertz, merupakan penyebab kemunduran pertanian di Jawa. Penjelasan selanjutnya tentang ‘involusi’ ini, lihat Sajogyo: ‘Kata Pengantar’ dalam *Involusi Pertanian* (Cliffrod Greertz), (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1983).

mencukup-cakupkan sumber nafkah yang ada, di antara mereka sendiri, sebagai *shared poverty* atau 'berbagai kemiskinan' (satu istilah lain dari Greertz), dan ini hanyalah konsekuensi belaka dari adanya situasi involusi tersebut.

Corak involusi usaha tani sebagai cara 'menyelamatkan kehidupan' suatu komunitas ini, selalu dan sangat mungkin terjadi sejauh struktur sosial masyarakat itu sendiri mendukungnya, artinya jika kelompok-kelompok sosial di dalamnya terikat dalam kewajiban-kewajiban sosial yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, antara petani kuat dengan petani yang lemah ekonominya, terikat dalam suatu pola hubungan 'bapak'-'pendukung' (patron-klien), dan pola hubungan tersebut tidak semata-mata ekonomis. Para pemilik tanah di sini merasa berkewajiban 'membagi rejeki' kepada para buruh tani atau penggarap dengan cara memperkerjakan mereka yang sebenarnya secara ekonomis tidak proporsional jumlahnya terhadap luas tanah si pemilik. Berdasarkan penelitian Vink pada tahun 1920-an dan 1930-an, yang dikutip oleh Sajogyo, diketahui bahwa di Jawa usaha tani 'terkena involusi' untuk sawah seluas antara 0,5 dan 1 Ha ternyata besarnya pemakaian buruh tani upahan (80% tenaga) oleh 98% petani dan kecilnya sumbangan keluarga petani sendiri. Dengan demikian, di tengah-tengah padatnya penduduk, sempitnya tanah serta kurangnya modal, involusi pertanian justru merupakan mekanisme penyelamat yang tidak ternilai bagi masyarakat petani.

Pada periode-periode selanjutnya terutama sejak tahun 1980, yaitu sejak diperkenalkannya teknologi pertanian baru secara intensif lewat 'revolusi hijau' atau berbagai macam inovasi lainnya, terlihat adanya kecenderungan semakin lemahnya involusi usaha tani. Dalam kaitan ini, Alan Strout menyatakan bahwa involusi sebagai cara 'penyesuaian-penyesuaian yang cukup berhasil' ini sudah menunjukkan tanda-tanda melemah, karena terus-menerus dipaksa bertabrakan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan teknologi yang kuat dan cepat yang datang dari luar, hingga kekuatan-kekuatan sosial yang biasanya cukup ampuh 'akan pecah bercerai-berai dan hilang daya tolongnya'. Ini didasarkan atau penelitiannya membandingkan ciri-ciri usaha tani persawahan di 20 desa di Jawa, dari Serang sampai Jember. Dalam hal ini berhasil ditunjukkan adanya kecenderungan bahwa pada usaha tani

yang (relatif) makin bebas dari involusi, sumbangan dan imbalan bagi buruh tani makin kecil, dan para petani lapisan atas yang telah mengenyam hasil teknologi baru (bibit unggul, pupuk kimia dan sebagainya) serta kredit murah, pada umumnya tidak menambah lagi penyerapan tenaga dalam hal bertanam padi sawah.²³ Ini berarti suatu upaya 'perlindungan bersama' juga mulai mundur.

Suatu keadaan yang hampir tidak berbeda dengan apa yang kini tengah dihadapi Pak Sutoyo, Pak Jausin dan Pak Basoni di desanya yang padat penduduk, langkah tanah serta sempit lapangan kerja yang tersedia. Struktur sosial yang sedemikian rupa tidak lagi memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja atau perolehan-perolehan ekonomi lainnya secara cukup dan layak dari sektor agraris. Ini berarti, golongan petani kuat yang selama ini lebih banyak memegang kunci perekonomian karena luas tanah yang dimiliki ataupun karena lebih mudahnya mereka memperoleh serta memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh lembaga-lembaga ekonomi pedesaan yang ada, seperti KUD, KUT, dan lain-lainnya, tidak lagi 'sepenuh hati' memberi perlindungan kepada orang-orang seperti Pak Sutoyo, Pak Jausin dan Pak Basoni (mereka hanyalah tiga orang dari sekian banyak orang miskin yang ada di desa Brodot), dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban sosial bagi komunitasnya. Hubungan komersial menggantikan hubungan sosial dalam ikatan antara patron dengan klien, antara petani dengan petani gurem atau buruh tani. Pudarnya ikatan-ikatan komunitas, melemahnya involusi,²⁴ telah semakin menjauhkan para petani miskin atau buruh tani dari kesempatan yang masih mungkin diraihnya untuk mempertahankan hidup bersama keluarganya, sebaiknya petani atau pihak yang

²³ Sajogya, *Pendekatan Kebutuhan dasar*....., 8.

²⁴ Salah satu sikap involutif terlihat, misalnya, dalam bentuk pepatah orang Jawa: *mangan ora mangan waton kumpul* (makan atau tidak makan asal dapat tinggal bersama-sama), lebih sering diartikan secara negatif sebagai gambaran ciri-ciri suku Jawa yang agak pasif dan pemalas, dan ini memang sukar dibantah. Namun kelemahan 'vonis' yang demikian itu juga jelas, karena yang dilihat dalam hal ini hanyalah gejala akibat saja, tanpa menganalisa lebih jauh sebab-sebabnya. Apabila kita bersedia mengartikannya secara positif, maka sudah barang tentu kita justru harus mengagumi sifat dan sikap kebersamaan dari fenomena involusi tersebut. Dalam kenyataannya, inilah cara yang paling tepat, terhormat dan manusiawi, untuk mengatasi masalah riil yang mereka hadapi (perhepi, 1982: 10).

ekonominya lebih kuat, semakin terdorong untuk memanfaatkan kesempatan dalam meraih keuntungan secara lebih bebas lagi.

Dengan perspektif yang sama, apa yang dialami Pak Sutoyo, Pak Jausin maupun Pak Basoni atas rendahnya tingkat penghasilan yang mereka terima, merupakan konsekuensi dari keadaan sosial-ekonomi secara keseluruhan dan merupakan kasus khusus atas memudarnya hubungan-hubungan patronage antara mereka yang miskin dengan mereka yang kuat ekonominya, di desa penelitian. Bagi ketiga orang tersebut, masalah utama yang dihadapi masing-masing hanyalah bagaimana menghasilkan atau mendapatkan beras cukup untuk makan sekeluarga, membeli beberapa barang kebutuhan minimal seperti garam dan kain dan untuk memenuhi tagihan-tagihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pihak-pihak luar. Tetapi yang kita lihat di sini adalah sebuah paradoks; dengan penghasilan sebulan sekitar Rp 200.000,- untuk Pak Sutoyo, Rp 150.000,- untuk Pak Jausin dan Rp 100.000,- untuk Pak Basoni, bagaimana ketiga orang ini harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimalnya atau tuntutan-tuntutan ekonomi lainnya?

Sekali lagi, jika dipakai ukuran tingkat penghasilan cukup dari Masri Singarimbun atas dasar penelitiannya di Sriharjo, yaitu dengan mengambil serendah 20 kg ekuivalen besar per orang sebulan, maka (jika harga beras Rp 8.000,- per kilogram) penghasil Pak Jausin dan Pak Basoni tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimal keluarganya.

Jadi masalah riil yang mereka hadapi, sebagaimana umumnya petani miskin, adalah masalah 'cukup' atau 'tidak cukup' hasil yang mereka peroleh dari sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi keluarga mereka. Dan pada dasarnya fluktuasi penghasilan dari sektor pertanian itu sendiri hampir selalu dan cenderung menentukan masalahnya. Masalah yang jelas menjadi kenyataan dan mesti dihadapi Pak Sutoyo, Pak Jausin maupun Pak Basoni adalah bahwa justru fluktuasi tersebut jatuh pada tingkat 'tidak cukup', atau bahkan "sangat tidak cukup". Keadaan ini, dalam konsepsi yang hampir sama, oleh James C. Scott (1983;24) diistilahkan sebagai krisis subsistensi, yaitu suatu keadaan yang secara kualitatif merosot di bawah tingkat atau garis

margin subsistensi²⁵ (dalam konteks ini, mengingat Pak Sutoyo yang memperoleh hasil tanah atau upah berupa uang, maka 'subsistensi' dalam hal ini diartikan secara sederhana sebagai kebutuhan 'asal dan makan'. Dicapainya satu tingkat 'tidak cukup' atau 'krisis subsistensi' ini sudah tentu tidak berarti keluarga Pak Sutoyo, Pak Jausin dan Pak Basoni yang penghasilannya tidak mencukupi untuk makan selama satu bulan itu secara otomatis mati kelaparan, sekalipun para petani kuat di desanya tidak lagi bisa diharapkan sebagai 'pelindung'. Tetapi keadaan yang demikian itu justru mendorong mereka untuk berusaha mencari penghidupan lain yang masih mungkin diraihinya, yaitu sumber penghidupan di luar sektor pertanian, sebagai sumber nafkah tambahan (pola nafkah berganda) ataupun sumber nafkah pengganti (untuk Pak Basoni).

Bagi mereka bertiga, menjadi tukang perahu merupakan suatu alternatif yang cukup realistis dalam rangka mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarganya di desa dibandingkan pekerjaan-pekerjaan non pertanian lainnya yang pernah mereka lakukan, seperti pekerjaan membuat lempeng (sejenis kerupuk) oleh Pak Sutoyo, makelar sepeda oleh Pak Jausin, ataupun menjadi buruh nebang di pabrik gula Lestari oleh Pak Basoni. Beberapa alasan yang mereka kemukakan untuk ini pada dasarnya tidak banyak berbeda, terutama mengenai penghasilan yang didapat, yaitu hasilnya lebih konkrit dan langsung bisa dinikmati serta cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak (dadakan), misalnya melunasi tagihan-tagihan hutang membeli alat-alat sekolah anak-anak mereka. Bagi Pak Basoni misalnya, yang memenuhi menjadi tukang perahu 1995, hasil yang bisa diperoleh secara langsung dari hasil menjadi tukang perahu tersebut lebih menguntungkan dibandingkan hasil atau upah yang diterimanya seperti ketika ia masih bekerja sebagai buruh nebang di pabrik gula, yang tidak tentu adanya.

Menjadi tukang perahu (menjalankan perahu) merupakan jenis pekerjaan yang tidak memerlukan modal, artinya hanya mengandalkan tenaga saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana

²⁵ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1983).

mendapatkan kepercayaan dari pemilik perahu supaya bisa menjalankan perahunya.

Beberapa alasan lain mengapa menjalankan perahu (tukang perahu) mereka pilih sebagai pekerjaan non pertaniannya adalah karena perahu yang hanya berteknologi sederhana itu, tidak terlalu sulit untuk bisa mengemudikannya, juga adanya kebebasan kerja, artinya bisa disambi dan tidak adanya keterkaitan secara formal dengan pemilik perahu, kecuali kewajiban menunjukkan seluruh hasil yang diperoleh (transparan), dengan adanya kebebasan soal waktu ini, barangkali juga menjadi alasan bagi mereka mengapa memilih pekerjaan jenis ini.

Dari hasil menjadi tukang perahu (menjalankan perahu) memang terjadi perbedaan antara Pak Sutoyo, Pak Jausin dan Pak Basoni. Pak Sutoyo, dia menempati jalur yang berada di Dukuh Klaci, yang mana di dukuh ini lalu lintasnya banyak, dukuh ini berdekatan dengan Desa Brangkal, maka perolehannya pun bisa mencapai Rp 100.000,- per bari, sehingga bagi dia (Pak Sutoyo) mendapat 1/3 atau Rp 30.000,- sehingga bila diambil rata-rata dari hasil tersebut Pak Sutoyo dapat mengumpulkan setiap bulannya Rp 300.000,- bersih.

Pak Jausin, dia ini lebih beruntung karena perahu yang dijalankannya menempati jalur yang paling ramai, artinya lalu lintas yang melalui jalur ini volumenya lebih banyak, karena jalur ini merupakan jalur utama Desa Brodot yang dapat menghubungkan dengan lalu lintas desa yang berada di sebelah timur, dan juga sangat berdampingan dengan pabrik gula Lestari, yang sudah barang tentu berpengaruh pada volume penumpang perahu, misalnya karyawan yang bekerja di pabrik tersebut, dan bahkan ada juga penumpang yang sudah menjadi pelanggan tetap, lebih-lebih pada musim giling (operasi pabrik), maka pantas jika Pak Jausin bisa mendapat tiga kali lipat dari Pak Sutoyo, artinya bisa mendapat Rp 120.000,- per hari sehingga dia mendapat 1/3 Rp 40.000,- per hari. Maka bila dijumlah setiap bulannya dapat mengumpulkan Rp 1200.000,- perbulan, tetapi perlu diketahui dalam menjalankan perahu Pak Jausin tidak dapat sendirian, harus dibantu dua orang lagi, karena perahu yang dijalankan besar sekali, di sini Pak Samud dan Jauri sebagai mitra kerjanya, , sehingga

sudah barang tentu hasilnya pun dibagi tiga, sehingga masing-masing mendapat Rp 400.000,-.

Lain lagi dengan Pak Basoni, dia menempati jalur yang berada di Dukuh Delik, yakni jalur yang lalu lintasnya yang paling sepi dari kedua di atas, sehingga pendapatannya pun lebih kecil, yakni rata-rata per hari antara Rp 20.000,- sampai Rp 50.000,- sehingga Pak Sukarli (pemilik perahu), memberikan kemurahan, artinya dia diberi lima ribu (Rp 10.000,-) per hari sehingga dia dapat dipastikan setiap bulan mendapat Rp 300.000,-.

Uang mereka (Pak Sutoyo, Pak Jausin, Pak Basoni) tersebut kemudian mereka gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari, membayar hutang keluarga, membeli pupuk dan obat-obatan tanaman, biaya sekolah anak-anaknya dan kebutuhan pokok lainnya.

KESIMPULAN

Kiranya terlampau kecil skalanya kalau gambaran yang didiskripsikan dalam tulisan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan menyeluruh tentang kenyataan-kenyataan sosial ekonomi masyarakat Islam yang tengah dihadapi oleh orang-orang seperti Pak Sutoyo, Pak Jausin, Pak Basoni dan sekian banyak tukang perahu di desa lain di sepanjang sungai Brantas Propinsi Jawa Timur. Mereka hanyalah tiga orang saja, namun demikian, masalah hakiki yang mereka hadapi itu, yaitu rendahnya tingkat pendapatan dan sempitnya kesempatan kerja, pada gilirannya menampakkan diri sebagai fenomena “Kemiskinan Pedesaan”. Ini berarti, untuk kuantitas data yang sangat sedikit dalam studi kualitas sektor agraris di desa penelitian tersebut disimpulkan dalam batas-batas sejauh hal itu melibatkan kehidupan ketiga responden tersebut serta menentukan masalah-masalah sosial ekonomi yang mereka hadapi itu, karena dalam hal ini masalah-masalah mereka itu pada dasarnya relatif banyak ditentukan oleh kondisi struktural yang ada di luar diri mereka yang tidak mampu mereka atasi, yaitu kondisi struktur agraris di desa asal itu sendiri.

Jadi, kemiskinan yang diderita Pak Sutoyo, Pak Jausin dan Pak Basoni tidak/ bukanlah disebabkan oleh hal-hal yang bersifat individual, misalnya kurang ulet dalam bekerja, enggan atau kurang pandai memanfaatkan berbagai fasilitas atau bantuan bagi usaha

pertanian modern yang telah disediakan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Masalah struktural di sektor agraris di Desa Brodot yang melibatkan ketiga responden tersebut adalah sebagai berikut:

Usaha tani milik Pak Sutoyo yang hanya seluas 0,12 Ha sehingga dikategorikan sebagai usaha tani gurem (dibawah 0,5 Ha) dan termasuk jenis sawah kering (tidak berpengairan) itu, menyebabkan rendahnya tingkat produktifitas yang bisa dicapai, bahkan tidak tertutup kemungkinan tanpa produktifitas sama sekali, misalnya karena terserang hama. Dalam hal ini, karena rendahnya tingkat produktifitas, Pak Sutoyo sering hanya mengkonsumsi sendiri hasil panennya, terutama setelah mendapat sumber nafkah dari sektor lain.

Adapun Pak Jausin dan Pak Basoni, dalam struktur agraris tergolong sebagai *tunakisman*, yaitu sama sekali tidak memiliki usaha tani, sehingga hanya mengandalkan kesempatan kerja sebagai penggarap atau buruh tani. Dalam konteks ini, masalah sosial ekonomi yang mereka hadapi, yaitu rendahnya tingkat pendapatan yang mereka peroleh, jika dikaitkan dengan struktur pemilikan tanah, merupakan akibat dari ketunakisman itu sendiri.

Dalam rangka modernisasi pertanian di Desa Brodot sebagaimana di desa-desa lainnya, dengan diperkenalkannya secara intensif berbagai macam teknologi pertanian baru atau yang dikenal dengan sebutan “revolusi hijau” atau diperkenalkannya berbagai bentuk kelembagaan modern seperti KUD, KUT, dan sebagainya, di sisi lain hal itu telah memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perubahan struktural sosial dalam komunitas petani, yaitu semakin melemahnya ikatan-ikatan komunitas atau pecahnya jaringan harmoni sosial desa yang memungkinkan mewujudkan jalur pemerataan. Walaupun dengan adanya modernisasi pertanian tersebut diperoleh manfaat yang sangat besar atas meningkatnya hasil produksi, maka keadaan ini telah mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang ada di sektor pertanian tersebut. Dalam hubungan ini modernisasi pertanian di Desa Brodot lebih banyak menguntungkan para petani yang kuat ekonominya, karena di samping tanahnya luas, juga mudahnya mereka mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh lembaga-lembaga pedesaan modern yang ada.

Rendahnya tingkat produktifitas atas usaha tani yang dimiliki Pak Sutoyo, di samping karena sempitnya tanah yang dimiliki, juga disebabkan oleh sulitnya melakukan intensifikasi. Bagi seorang petani gurem seperti Pak Sutoyo ini, untuk melakukan intensifikasi pertanian, tentu biaya produksi yang mesti dikeluarkan terlalu memberatkan, sementara fasilitas perkreditan yang disediakan oleh pemerintah untuk keperluan produksi yang memadai, tidak jarang hanya diperuntukkan golongan petani yang lebih kuat ekonominya, karena golongan inilah yang memiliki kemampuan untuk tidak melakukan tunggakan dalam mengembalikan kredit beserta bunganya.

Di pihak lain, intensifnya intraduksi teknologi pertanian baru, misalnya: dikenalkannya traktor, yang secara ekonomis mendukung efisiensi atas biaya produksi usaha tani, ikut andil dalam mengurangi kesempatan kerja golongan buruh seperti Pak Basoni. Traktor pertanian yang disediakan oleh Bos/KUD ini tidak saja dimanfaatkan oleh petani kuat, tetapi petani gurem pun sering memanfaatkannya.

Suatu keadaan yang cukup paradoks di tengah-tengah usaha modernisasi pertanian di Desa Brodot ini adalah masih terdapatnya kelembagaan hubungan kerja tradisional, yaitu yang berkaitan erat dengan kelembagaan transaksi hasil tanah atau perjanjian bagi hasil yang melibatkan seorang penggarap dengan pemilik tanah, dengan syarat yang lebih sering ditentukan sendiri oleh pemilik tanah yang hampir dapat dipastikan merugikan penggarap seperti Pak Jausin, ditambah lagi bila ada resiko gagal panen ditanggung penggarap.

Dengan penghasilan rata-rata setiap bulan yang diterima masing-masing yaitu sebesar Rp 300.000,- perbulan untuk Pak Sutoyo, untuk Pak Jausin Rp 400.000,- perbulan dan untuk Pak Basoni Rp 300.000,- maka jelas ini mendorong mereka ke dalam situasi kemiskinan, lebih-lebih seperti sekarang semua harga barang kebutuhan sehari-hari harganya membumbung tinggi terlebih setelah harga BBM naik alias berganti harga setelah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Keadaan ini mendorong (*push factor*) bagi mereka dan merupakan motivasi pribadi untuk mendapatkan sumber nafkah tambahan atau pengganti dari sektor non pertanian.

Perahu, sebagai salah satu jenis angkutan sederhana di Desa Brodot mempunyai daya tarik tersendiri bagi ketiga responden. Hal-hal yang menarik mereka meliputi: tidak diperlukan modal, hasilnya dapat dinikmati secara langsung, mudah dalam mengemudikannya, serta adanya kebebasan kerja.

Dengan penghasilan lebih dari Rp 250.000,- rata-rata dari setiap bulannya dari menjadi tukang perahu ini, paling tidak mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama-sama keluarga, lebih-lebih dalam suasana sekarang, di mana semua kebutuhan hidup naik dua sampai tiga kali lipat dari harga yang sesungguhnya (sebelum krisis moneter).

DAFTAR PUSTAKA

- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Ida Bagus Mantra. (1976). *Studi Mobilitas Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Fak. Geografi, UGM.
- Khozin Afandi. (2007). *Hermeneutika dan Fenomenologi: Dari Teori Ke Praktek*, Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.
- Koentjoroningrat. (1997). *Metode Wawancara Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Masri Singarimbun dan DH. Penny. (1984). *Penduduk dan Kemiskinan, Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Noeng Muhajir. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sajogyo. (1981). *Pendekatan Kebutuhan Dasar Manusia Bagi Perbaikan Keadaan Gizi Kaum Miskin*, Yogyakarta: Agro Ekonomika, Agustus (XII dan XVI) Perhepi.
- Soehardi. (1997). *Tebasan Sebagai Subsistem Desa dan Kesempatan Kerja*, Yogyakarta: Gema Antropologi, No. 4 dan 5 Tahun III.